MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-39/MK/PK/2025 27 Oktober 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA PPAS Dengan KEM PPKF Tahun 2026 Untuk 3 Provinsi

Yth. Gubernur (terlampir)

Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA PPAS provinsi dengan KEM PPKF.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA PPAS Provinsi dengan KEM PPKF TA 2026 (terlampir). Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian kesesuaian ini, pemerintah provinsi melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA PPAS yang sedang dilakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hal rancangan KUA PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Selanjutnya, untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan program-program daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dan mempedomani Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Terkait alokasi TKD Tahun 2026, Pemerintah Daerah dapat mengakses alokasi tersebut pada laman resmi DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id) sebelum ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Selanjutnya, untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Contact Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Tembusan:
Menteri Keuangan

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
Surat Dirjen Perimbangan Keuangan a.n
Menteri Keuangan
Nomor : S-39/MK/PK/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Askolani

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
Surat Dirjen Perimbangan Keuangan a.n
Menteri Keuangan
Nomor : [@NomorND]
Tanggal : [@TanggalND]

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026
Provinsi Kepulauan Riau

Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan Rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud dilakukan minimal sesuai target kinerja makro Daerah dan target kinerja program Daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF.

Selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD, yang juga disampaikan oleh:

a. gubernur kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
b. bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS provinsi dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF disampaikan oleh:

a. Menteri Keuangan kepada gubernur; dan
b. Gubernur kepada Bupati/Wali Kota, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima.

Secara teknis ketentuan tentang tata cara penilaian di atas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut adalah ringkasan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk **Provinsi Kepulauan Riau**, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

A. Target Makro:
   a. Target Pertumbuhan Ekonomi : SELARAS
   b. Target Tingkat Kemiskinan : SELARAS

B. Penyelarasan Narasi KUA
   a. Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)
   b. Kesehatan (Indeks Kesehatan) : SELARAS
   c. Ketahanan Pangan (Perikanan) : SELARAS
   d. Ketahanan Pangan (Pertanian) : SELARAS
   e. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan) : SELARAS
   f. Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi) : SELARAS

Secara lengkap berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF untuk **Provinsi Kepulauan Riau** sesuai lampiran.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Askolani

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	5,2%-5,8%	5,46-7,38	Target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,46%-7,38% sudah tercantum dalam dokumen rancangan KUA PPAS TA 2026. Target yang direncanakan oleh pemda tersebut sudah searah dan melebihi target pertumbuhan ekonomi pada KEM PPKF Regional. Pemda telah konsisten dan secara eksplisit menyertakan rencana pertumbuhan ekonomi tersebut dalam rancangan KUA PPAS TA 2026 yang nantinya akan dibahas kembali bersama TAPD. Selain itu, pemda agar mengkoordinasikan angka target pertumbuhan dimaksud kepada kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Tingkat Kemiskinan	3%-4%	4,17-3,77	Target penurunan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau telah dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen rancangan KUA PPAS Tahun 2026 sebesar 3,77%-4,17%. Target ini masih dalam rentang target KEM Tahun 2026 namun pemda diharapkan memperhatikan batas atas target sebesar 4%. Dengan target yang direncanakan, pemda agar dapat mengkomunikasikan rencana penurunan target kemiskinan tersebut kepada kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, dalam rangka mencapai angka target tersebut hendaknya didukung dengan penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan.

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, pemda Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukan komitmen terhadap pemenuhan indikator pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam rangka mencapai program yang direncanakan tersebut hendaknya didukung dengan penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan.
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	SELARAS	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah pada komitmen pemenuhan indikator kesehatan. Meskipun demikian, pemenuhan indikator kesehatan masih perlu ditambah dengan penyiapkan skema sinergi pendanaan untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.
Ketahanan Pangan (Perikanan)	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan komitmen pemda terhadap pemenuhan indikator pangan (perikanan). Namun demikian, sinergi pendanaan maupun creative financing perlu disusun agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan DAK untuk peningkatan infrastruktur perikanan.
Ketahanan Pangan (Pertanian)	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah pada pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, pemda agar menyertakan program penetapan tarif PBB P2 yang lebih rendah untuk mendukung produksi pangan sekaligus menghindari alih fungsi lahan pertanian. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu diarahkan pada sinergi pendanaan dalam rangka peningkatan infrastruktur pertanian.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	SELARAS	Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukan komitmen terhadap pemenuhan indikator tingkat kemiskinan. Selanjutnya, komitmen tersebut perlu disertai dengan penyiapan dukungan pemerintah daerah untuk penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka pengembangan desa mandiri selain dari pemberian bantuan keuangan. Peningkatan kelembagaan desa dapat dimodifikasi dengan pemberian kapasitas perangkat desa semisal pengenalan teknologi AI dalam penyelenggaraan proses panen komoditas di desa serta upaya membuka akses ke pasar yang lebih mudah bagi pelaku UMKM.
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	SELARAS	Sejauh ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukan komitmen terhadap peningkatan kualitas belanja yang mendukung SPM pendidikan. Program tersebut dapat pula dilakukan melalui skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi). Selanjutnya, komitmen tersebut agar direalisasikan melalui penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan.

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	• Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek; • Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor, mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal; • Pembangunan infrastruktur konektifitas dalam hal transportasi darat dan perikanan sesuai dengan RPJMN; • Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.; • Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah.	none	1) Penguatan tata kelola investasi seperti deregulasi perizinan, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pelaksanaan proyek, Fokus kebijakan ini diwujudkan melalui upaya deregulasi perizinan dengan pengembangan sistem layanan berbasis digital yang cepat, transparan, dan mudah diakses, disertai peningkatan kapasitas aparatur dalam mempercepat proses perizinan. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui reformasi tata kelola pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi serta optimalisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor, hal ini telah diwujudkan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal disamping itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi. 2) Alokasi belanja ekonomi yang mendukung Pengembangan koridor industri semikonduktor,mesin dan perlengkapan, dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, logam, besi, dan baja, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal yaitu ; 2.a. Mengarahkan program pembangunan ekonomi daerah untuk mendukung pengembangan kawasan industri strategis, khususnya di wilayah yang memiliki	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, pemda Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukan komitmen terhadap pemenuhan indikator pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dalam rangka mencapai program yang direncanakan tersebut hendaknya didukung dengan penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			potensi hilirisasi sumber daya alam dan industri maritim melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras pembangunan jalan ke pelabuhan, Kab. Kepulauan Anambas dan Pembangunan Jalan Batu Ampar-Batu Nyodong, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau; 2.b. Mendukung transformasi ekonomi hijau dengan mengalokasikan belanja daerah pada kegiatan yang mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan pada Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan dalam Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT yaitu belanja lampu Jalan Tenaga surya di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau; 2.c. Menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan pengembangan industri halal, baik melalui penguatan regulasi, fasilitas sertifikasi, maupun dukungan promosi produk halal di pasar domestik dan global melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dalam Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha yang membantu pelaku UMKM		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			dalam penertbitan sertifikat halal. 3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dalam hal transportasi darat dan perikanan sesuai dengan RPJMN, Seluruh kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas diarahkan untuk sejalan dengan RPJMN, dengan tetap memperhatikan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau; 3.a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan serta jembatan strategis guna memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang tercantum pada Program Penyelenggaraan Jalan dalam Peningkatan Jalan Simpang Budus - Pelabuhan Roro Penarik dan Pembangunan Jembatan Moro Jang, Kabupaten Karimun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 3.b. Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan, termasuk cold storage, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas logistik yang mendukung rantai pasok hasil perikanan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan serta Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Perikanan dalam Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau. 4) Meningkatkan persentase pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas, Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui kebijakan belanja daerah diantaranya Pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang berfungsi sebagai penghubung utama antarwilayah, kawasan strategis, serta pusat pertumbuhan ekonomi, guna mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang tercantum melalui Program Penyelenggaraan Jalan dalam Rehabilitasi Jembatan, Pembagunan Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pembangunan Jalan yang pagu belanjanya bersumber dari PKB dan Opsen PKB. 5) Pemberian insentif fiskal PDRD secara selektif untuk sektor unggulan daerah, Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemberian keringanan, pengurangan, atau penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara selektif, dengan		
			tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah, Kebijakan ini juga mencermin upaya dalam peningkatan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	• Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; • Melakukan skema Sinergi Pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infra layanan kesehatan.	none	1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta penguatan layanan rujukan dan layanan kesehatan primer melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 2) Pemutakhiran basis data NJOP dan PDRD, termasuk penguatan infrastruktur sistem informasi pajak daerah serta pelaksanaan survei lapangan dan pemetaan objek pajak melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 3) Penguatan program promotif dan preventif kesehatan dengan memanfaatkan alokasi earmarking Pajak Rokok, antara lain untuk kampanye bahaya rokok, pengendalian penyakit tidak menular, serta peningkatan layanan deteksi dini melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 4) Penguatan perencanaan pendanaan penyediaan sarana prasarana kesehatan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengadaan Alat	SELARAS	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah pada komitmen pemenuhan indikator kesehatan. Meskipun demikian, pemenuhan indikator kesehatan masih perlu ditambah dengan penyiapkan skema sinergi pendanaan untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib. 5) Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung prioritas belanja kesehatan berbasis kinerja.		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Perikanan)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;	none	Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan indeks sebesar 105,30 1) Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur, Upaya ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat dalam pemanfaatan dana transfer ke daerah, termasuk optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan skema matching fund untuk pembiayaan proyek strategis. Dalam mendukung hal tersebut, alokasi belanja daerah juga difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya melalui Peningkatan Jalan Simpang Budus - Pelabuhan Roro Penarik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2) Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan, keterkaitan dengan hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pemetaan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dalam Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan komitmen pemda terhadap pemenuhan indikator pangan (perikanan). Namun demikian, sinergi pendanaan maupun creative financing perlu disusun agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan DAK untuk peningkatan infrastruktur perikanan.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Penguatan kerja sama antar daerah	none	Berdasarkan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan indeks sebesar 100,2. Dalam rangka dukungan terhadap Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi petani tentang teknologi dan inovasi pertanian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dukungan dalam kebijakan belanja daerah melalui Program Penyuluhan Pertanian pada Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian, Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	SELARAS	Berdasarkan narasi yang telah disampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah pada pembangunan sektor pertanian. Selanjutnya, pemda agar menyertakan program penetapan tarif PBB P2 yang lebih rendah untuk mendukung produksi pangan sekaligus menghindari alih fungsi lahan pertanian. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu diarahkan pada sinergi pendanaan dalam rangka peningkatan infrastruktur pertanian.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	• Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	1) Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri, menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui beberapa kebijakan Penguatan kelembagaan desa melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan untuk peningkatan kapasitas dan operasional perangkat desa yang direalisasikan melalui Bantuan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daeerah Provinsi Kepulauan Riau 2) Dukungan APBD untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi melalui melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan memberikan sertifikasi keahlian bagi para pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 3) Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin. Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan dukungan melalui beberapa kebijakan belanja daerah yaitu dengan mengalokasikan pendapatan yang bersumber pajak rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SELARAS	Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukan komitmen terhadap pemenuhan indikator tingkat kemiskinan. Selanjutnya, komitmen tersebut perlu disertai dengan penyiapan dukungan pemerintah daerah untuk penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka pengembangan desa mandiri selain dari pemberian bantuan keuangan. Peningkatan kelembagaan desa dapat dimodifikasi dengan pemberian kapasitas perangkat desa semisal pengenalan teknologi AI dalam penyelenggaraan proses panen komoditas di desa serta upaya membuka akses ke pasar yang lebih mudah bagi pelaku UMKM.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			untuk mendukung pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional secara tepat waktu dan tepat sasaran melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.		
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	• Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	1) Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis digital, dengan penyediaan perangkat teknologi, penguatan jaringan internet sekolah/perguruan tinggi, serta pengembangan konten pembelajaran interaktif termasuk koding dan kecerdasan buatan (AI) yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan menengah dan Khusus melalaui Program Pengelolaan Pendidikan; 2) Pemanfaatan DAU earmarked serta evaluasi terhadap mandatory spending sektor pendidikan, guna memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan; 3) Penyediaan bantuan pendidikan bagi peserta didik, termasuk beasiswa, bantuan operasional pendidikan, serta program afirmasi bagi masyarakat di daerah kepulauan dan perbatasan seperti SPP gratis pada satuan pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.	SELARAS	Sejauh ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukan komitmen terhadap peningkatan kualitas belanja yang mendukung SPM pendidikan. Program tersebut dapat pula dilakukan melalui skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi). Selanjutnya, komitmen tersebut agar direalisasikan melalui penganggaran dalam APBD untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan.

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Belanja	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.						

PDRD

Jenis	Nilai KUA/PPAS	Total Pendapatan	Nilai Minimal	Persentase	Batasan	Status	Catatan
Belum ada data.							

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani